

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
TA. 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
Jl. Gatot Subroto Km 7 No. 255 Telp. (061) 8461436 MEDAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media penyebarluasan informasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk membuat kebijakan dan sebagai perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan secara optimal, untuk itu kami sangat menghargai sumbangan pemikiran dan saran yang membangun dalam menyusun laporan pada masa yang akan datang

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ini kami ucapkan terima kasih.

**Medan, Januari 2023**  
**Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan**  
**Provinsi Sumatera Utara**

**ZUBIR HARAHAHAP, S.Sos., MAP**  
**Pembina Tingkat I**  
**19670610 198811 1 002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI .....		ii
BAB I    PENDAHULUAN .....		I-1
1.1. Latar Belakang.....		I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .....		I-2
1.3. Gambaran Umum Perangkat daerah.....		I-2
1.4. Struktur Organisasi .....		I-4
1.5. Sumber Daya Manusia .....		I-6
BAB II    PERENCANAAN KERJA .....		II-1
2.1 Rencana Strategis .....		II-1
2.2 Rencana Kinerja .....		II-2
2.3 Perjanjian Kinerja.....		II-3
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....		III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....		III-1
3.1 Pengukuran Kinerja .....		III-1
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....		III-2
B. REALISASI ANGGARAN .....		III-15
3.3 Analisis Capaian Kinerja Keuangan .....		III-15
BAB IV    PENUTUP .....		IV-1
4.1 Tinjauan Umum .....		IV-1
4.2 Tinjauan Khusus .....		IV-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang dalam melaksanakan tugas senantiasa berupaya menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance) sesuai dengan cita – cita dan harapan seluruh lapisan masyarakat dan berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi, sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyelenggara pemerintahan negara maka instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud perwujudan kinerja atas pencapaian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **A. Maksud**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sarana informasi pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara atas kebijakan, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera tahun anggaran 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 - 2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera.

### **B. Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bertujuan untuk

1. Mewujudkan akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan ketahanan pangan dan peternakan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi di Bidang Ketersediaan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- A.** menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan dinas;
- B.** menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- C.** menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- D.** Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan;
- E.** Menyelenggarakan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan;
- F.** Menyelenggarakan pengkoordinasian pengawasan bidang bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan;
- G.** Menyelenggarakan penegakkan hukum bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan;
- H.** Menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
- I.** Menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah da swasta dalam pengelolaan Ketahanan Pangan dan Peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- J. Menyelenggarakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- K. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- L. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Melalui Sekretaris daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- M. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

#### **1.4 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh:

1. Sekretariat
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
  - c. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
  - a. Seksi Ketersediaan Pangan
  - b. Distribusi dan Cadangan Pangan
  - c. Kerawanan Pangan
3. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
  - a. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
  - b. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  - c. Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan
4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
  - a. Kepala Seksi Investigasi Penyakit Hewan
  - b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
  - c. Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan
5. Kepala Bidang Peternakan
  - a. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak
  - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

- c. Kepala Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan
- 6. Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Seksi Pengujian Mutu Pangan
  - c. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
- 7. Kepala UPT Balai Inseminasi Buatan
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Seksi Produksi
  - c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi
- 8. UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - a. Kepala Sub Bagian tata Usaha
  - b. Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi
  - c. Seksi Pangandan non Pangan
- 9. UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi
  - c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi
- 10. UPT Pembibitan Ternak Ungggas dan Sapi Sihitang
  - a. Kepala Sub bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi
  - c. Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi
- 11. UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak
  - a. Kepala Sub bagian Administrasi
  - b. Kepala Sub Bidang Mutu
  - c. Kepala Sub Bidang Teknis
- 12. UPT Rumah Sakit Hewan
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Seksi Pelayanan Medik
  - c. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medik



## 1.5 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2022 sebanyak 183 orang dengan uraian seperti pada Tabel 1 dibawah.

Tabel. Jumlah Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah SDM per 1 Januari 2021	195
2	Mutasi selama tahun 2020 :	
	Pensiun	11
	Mutasi masuk	3
	Mutasi keluar	0
	Meninggal	4
3	Jumlah SDM per 31 Desember 2022	183

Dari jumlah tersebut, komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan seperti tertera pada Tabel 2 berikut:

### 1) Berdasarkan jenjang jabatan (peran)

Tabel. Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan (Peran)

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	10
	- Eselon IV	26
2	Pejabat Fungsional Umum	119
3	Pejabat Fungsional Tertentu	27
	<b>Jumlah</b>	<b>183</b>

### 2) Berdasarkan strata pendidikan

Tabel. Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	0
2	S-2	36
3	S-1	104
4	Diploma III	4
5	Diploma II	0
6	Diploma I	0
7	SLTA	35

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
8	SLTP	2
9	SD	2
<b>Jumlah</b>		<b>183</b>

### 3) Berdasarkan Golongan

Tabel. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	29
2	Golongan III	123
3	Golongan II	29
4	Golongan I	2
<b>Jumlah</b>		<b>183</b>

## 1.6 Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, serta selaras dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 maka permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

### A. Pangan

#### 1. Belum optimalnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada dan pola makan yang dianut oleh masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Antara lain; 1) Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga; 2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; 3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan

daya terima; 5) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; 6) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

## 2. Rendahnya pengawasan pangan yang beredar

Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, Antara lain: 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama produk pangan segar; 2) Masih banyaknya petani belum memahami dan menerapkan cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; 3) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas; 4) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; 5) standar keamanan pangan untuk buah dan sayuran segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk kedalam negeri; 6) belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar; 7) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan 8) Masih rendahnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

## 3. Masih terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan tertentu

Kestabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan pada saat ini merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen maupun konsumen. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras maupun lunak untuk membangun transparansi informasi pasar. Penurunan harga pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar harga pangan meningkat tinggi menekan konsumen, tetapi harga

tersebut sering tidak dinikmati oleh petani produsen. Terbatasnya kelembagaan yang menyediakan permodalan bagi petani dan prosedur penyaluran yang kurang mengapresiasi sifat usahatani dan resiko yang dihadapi, merupakan kendala bagi berkembangnya usahatani. Demikian juga, kurang memadainya sarana dan prasarana fisik transportasi menjadi kendala berkembangnya industri hulu dan hilir sebagai wahana bagi peningkatan pendapatan petani di perdesaan dan tingginya biaya pemasaran bahan pangan di beberapa daerah konsumen.

## B. Peternakan dan Kesehatan Hewan

### 1. Sarana Pertanian

#### - Ketersediaan Bibit Unggul

Belum tersedianya bibit ternak ruminansia yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas, serta masih tingginya pemotongan ternak betina produktif .

#### - Ketersediaan Pakan

Belum tercukupinya makanan ternak terutama hijauan yang berkualitas. Serta masih terbatasnya lahan perkebunan untuk penggembalaan yang dapat diakses oleh peternak.

### 2. Prasarana Pertanian

#### - Ketersediaan Prasarana Peternakan

Dalam rangka memajukan pembangunan pertanian diperlukan prasarana yang memadai. Hingga saat ini prasarana peternakan yang ada belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti prasarana laboratorium, pabrik pakan dan rumah kompos.

#### - Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM Peternakan

Masih minimnya jumlah petugas teknis lapangan (Penyuluh, Inseminator, Petugas kecamatan, petugas kesmavet, petugas kesehatan hewan dan petugas teknis lainnya) serta masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pelaku utama pembangunan peternakan dan kesehatan hewan masih menjadi masalah dalam memajukan pembangunan peternakan di Sumatera Utara.

#### - Keterbatasan Modal

Terbatasnya modal pelaku utama pembangunan peternakan serta pada sisi lain fasilitas kredit dari lembaga keuangan sulit diperoleh.

3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Hewan Veteriner

Masih adanya kasus kesehatan hewan terutama penyakit hewan menular strategis.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja dan penetapan kinerja merupakan dokumen yang sangat vital dalam menentukan arah kebijakan tahun yang bersangkutan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi, sehingga setiap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah harus didahului dengan perencanaan kerja

#### **2.1 Rencana Strategis**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai salah satu bagian integral dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menetapkan suatu dokumen rencana lima tahunan guna memberi arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah ke depan yang dituangkan dalam program dan rencana pembangunan lima tahunan. Dokumen rencana pembangunan dimaksud adalah Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2019 - 2023.

Penyusunan P-Renstra ini mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Dokumen P-Renstra ini merupakan penjabaran dari sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada visi dan misi Gubernur Sumatera Utara dan juga mempedomani visi dan misi Kementerian Pertanian. Secara garis besar, dokumen ini menjabarkan tentang isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, kebijakan, indikator kinerja serta rencana program dan kegiatan.

Sasaran pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan sasaran strategis sesuai dengan dokumen P-Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 antara lain :

- 1) Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat
- 2) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan

Sasaran-sasaran ini sangat mencerminkan Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu “Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”. Serta Misi I yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan Karena

Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang Dan Pangan Yang Cukup, Rumah Yang Layak, Pendidikan Yang Baik, Kesehatan Yang Prima, Mata Pencaharian Yang Menyenangkan Serta Harga-Harga Yang Terjangkau”.

## 2.2 Rencana Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari P-Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, disusun suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis. Rencana Kerja ini merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan penganggaran OPD

Sasaran strategis tahun 2022, yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 memfokuskan pada 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat
- 2) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan

Untuk mengukur keberhasilan dari pada sasaran strategis tersebut, terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu :

Tabel. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan  
Tahun 2019 – 2023

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Definisi Operasional (3)	Formulasi	Sumber Data (4)
1 Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keragaman Pangan Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau pola konsumsi pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) untuk memenuhi kebutuhan kalori serta zat gizi dalam jumlah yang cukup.	Persentase kontribusi energi tingkat konsumsi x bobot ideal skor PPH tingkat konsumsi	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
2 Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Rasio antara indeks harga yang diterima petani/peternak (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani/peternak (Ib).	$NTP = (It/Ib) \times 100$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
	2 Produksi Daging (ton)	Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu.	Jumlah Produksi Peternakan (Daging) Sumatera Utara merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
	3 Produksi Telur (ton)	Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, itik, burung puyuh dan itik manila) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain.	Jumlah Produksi Peternakan (Telur) Sumatera Utara merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
	4 Produksi Susu (ton)	Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dan sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan kepada orang lain.	Jumlah Produksi Peternakan (Susu) Sumatera Utara merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

### **2.3 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Sehubungan dengan hal itu, Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 dilakukan setelah ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 yang mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja atas sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dalam hal pembangunan ketahanan pangan dan peternakan dilaksanakan melalui 6 program. Program ini sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tahun 2021. Program-program yang dimaksud adalah :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 6) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



Adapun esensi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1 Meningkatkan Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89,59
2 Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	116,02
	2 Produksi daging (ton)	224.675,08
	3 Produksi telur (ton)	484.390,39
	4 Produksi susu (ton)	5.306,40

Untuk mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan diimplementasikan ke dalam 3 program dan 11 kegiatan yaitu :

Tabel. Program dan Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja 2022

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	
<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
3	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	
4	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	
5	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	
6	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

7	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
8	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	
9	Penataan Prasarana Pertanian
<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	
10	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban tugas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Uraian akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dapat dibedakan menjadi dua sub bab pembahasan yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data Kinerja**

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang secara sistematis didasarkan pada laporan dari unit pelaksana dilingkungannya dan dari eksternal Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara seperti Dinas yang menangani fungsi ketahanan pangan dan peternakan di kabupaten/kota se Sumatera Utara serta Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

## 2. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Adapun penjelasan atau deskripsi tentang indikator kinerja dan definisi operasional serta rumus perhitungan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Definisi Operasional (3)	Formulasi	Sumber Data (4)
1 Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keragaman Pangan Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau pola konsumsi pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) untuk memenuhi kebutuhan kalori serta zat gizi dalam jumlah yang cukup.	Persentase kontribusi energi tingkat konsumsi x bobot ideal skor PPH tingkat konsumsi	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
2 Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Rasio antara indeks harga yang diterima petani/peternak (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani/peternak (Ib).	$NTP = (It/Ib) \times 100$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
	2 Produksi Daging (ton)	Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu.	Jumlah Produksi Peternakan (Daging) Sumatera Utara merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
	3 Produksi Telur (ton)	Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, itik, burung puyuh dan itik manila) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain.	Jumlah Produksi Peternakan (Telur) Sumatera Utara merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
	4 Produksi Susu (ton)	Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dan sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan kepada orang lain.	Jumlah Produksi Peternakan (Susu) Sumatera Utara merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator sasaran tersebut dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang

4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja difokuskan terhadap capaian masing-masing sasaran strategis tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran berdasarkan masing-masing indikator kinerja dan satuan pengukurannya. Data pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2022  
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian sd. Triwulan IV	Persentase Pencapaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,59	87,2	97,33	Sangat Baik
2.	Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	116,02	101,13	87,17	Tinggi
		Produksi Daging (Ton)	224.675,08	280.713,07	124,94	Sangat Baik
		Produksi Telur (Ton)	484.390,39	649.490,86	134,08	Sangat Baik
		Produksi Susu (Ton)	5.306,40	6.217,68	117,17	Sangat Baik

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta 5 (lima) indikator kinerja utama. Dari kelima indikator kinerja utama tersebut terdapat dua

indikator kinerja utama yang tidak mencapai target yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi serta Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan. Sedangkan tiga indikator kinerja utama lainnya yaitu Produksi Daging, Produksi Telur dan Produksi Susu melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian kinerja per sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat

**Indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**

Tabel. Perkembangan Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Persentase Pencapaian (%)	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Capaian				
Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	89,59	87,2	97,33	89,6	83,8	85

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Sumatera Utara tahun 2022 mencapai 87,2 poin. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tersebut masih dibawah target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2022 yaitu sebesar 89,59 poin. Walaupun belum mencapai target, akan tetapi capaian tersebut meningkat 2,59% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 85,0 poin walaupun masih lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2019 yang mencapai 89,6 poin. Menurunnya capaian skor PPH Konsumsi dibandingkan tahun 2019 salah satunya disebabkan oleh mewabahnya virus Covid-19 yang menyebabkan menurunnya keadaan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat cenderung mengurangi mengolah pangan yang berbeda tiap harinya. Akan tetapi capaian skor PPH Konsumsi tahun 2022 ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan keberagaman makanan sudah cukup baik. Walaupun Skor PPH mengalami belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun konsumsi energi masyarakat yang merupakan sumber tenaga masyarakat Sumatera Utara dalam beraktivitas sebesar 2.070,9kkal/kap/hari sudah memenuhi 96,3% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2150 kalori dan sudah tergolong tahan

pangan. Konsumsi beras masih berada di atas konsumsi ideal yaitu 311,9 gram per kapita per hari atau 113,8 kg/kap/tahun dan konsumsi ini sudah menurun dibanding konsumsi tahun 2021 sebesar 116,03 kg/kap/tahun. Penurunan konsumsi beras ini sudah menggambarkan peningkatan keberagaman konsumsi sumber energi.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat tahun 2022 didukung oleh pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan serta Program Pengawasan Keamanan Pangan. Dari ketiga program tersebut hanya satu program yang tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Tabel. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Renstra 2019 – 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Target Tahun Akhir Renstra (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
		Target	Capaian		
Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	89,59	87,2	92,5	94,27

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target pada akhir tahun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Tahun 2023). Terlihat bahwa capaian Skor PPH Konsumsi pada tahun 2022 telah mencapai 94,27% dari target 92,5 pada akhir tahun Renstra. Untuk mencapai target tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera akan meningkatkan promosi dan kampanye pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan agar masyarakat Sumatera Utara bisa mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan yang ketersediaannya di pasaran sudah mencukupi kebutuhan.

Tabel. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dengan Target Nasional 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	92,8	87,2

Dapat kita lihat pada tabel diatas perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Sumatera Utara tahun 2022 dengan target Skor PPH Konsumsi nasional tahun 2022 dimana capaian Skor PPH Konsusmi Sumatera Utara mencapai 93,97% dari target dari target nasional yang sebesar 92,8%. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman konsumsi masyarakat Sumatera Utara masih dibawah rata-rata nasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan dan kebiasaan masyarakat Sumatera Utara yang umumnya masih sering mengolah bahan pangan satu kali sehari sehingga mengkonsumsi bahan makanan yang sama setiap harinya yang berakibat keberagaman bahan pangan cenderung belum tercapai. Kedepannya masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi beberapa golongan pangan alternatif seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak dan juga kacang-kacangan karena tingkat konsumsinya masih dibawah standar yang dianjurkan.

Secara umum, faktor – faktor penghambat keberhasilan capaian Skor PPH Konsumsi pada tahun 2022 yaitu :

- Kebiasaan masyarakat Sumatera Utara yang umumnya masih sering mengolah bahan pangan satu kali sehari;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);

Kedepannya untuk mencapai target Skor PPH Konsumsi pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan strategi :

- meningkatkan konsumsi beberapa golongan pangan alternatif seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak dan juga kacang-kacangan;
- meningkatkan promosi dan kampanye pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman);
- memperkuat distribusi serta akses pangan



- pemanfaatan lahan perkarangan rumah tangga sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga.

## 2. Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan

### **Indikator 1 : Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Peternakan**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Mulai Januari 2020, penyusunan NTP menggunakan tahun dasar 2018=100

Arti angka NTP adalah sebagai berikut :

- NTP > 100, petani mengalami surplus. Hal ini terjadi ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat dari pada tingkat rata – rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.
- NTP = 100, petani tidak mengalami impas/break even. Hal ini terjadi ketika perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.
- NTP < 100, petani mengalami defisit. Hal ini terjadi ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Nilai Tukar Petani Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Bulan	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Perubahan NTP
Januari	111,75	108,43	103,07	

Februari	110,38	108,78	101,47	-1,55
Maret	111,81	109,59	102,03	0,55
April	113,76	109,86	103,55	1,48
Mei	115,21	110,5	104,26	0,69
Juni	114,55	112,58	101,75	-2,41
Juli	113,55	113,36	100,17	-1,58
Agustus	112,74	112,48	100,23	0,06
September	113,22	113,05	99,67	-0,56
Oktober	112,21	113,04	99,28	-0,41
November	112,11	112,98	99,22	-0,04
Desember	112,62	113,97	98,82	-0,41
Rerata	112,83	111,55	101,13	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Pencapaian NTP Peternakan sepanjang tahun 2022 menunjukkan trend yang fluktuatif setiap bulannya dan mengalami penurunan di triwulan IV. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, capaian NTP sub sektor peternakan mencapai 101,13 poin dimana capaian ini kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 116,02 atau 87,17%.

Tabel. Perkembangan Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan  
Tahun 2019 - 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Persentase Pencapaian (%)	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Capaian				
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	116,02	101,13	87,17	114,91	98,74	103,08

Dari tabel diatas terlihat bahwa NTP Peternakan Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masih mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 NTP Peternakan telah mencapai 114,91 poin kemudian turun menjadi 98,74 poin pada tahun 2020 kemudian naik 4,34 poin pada tahun 2021 menjadi 103,08 poin kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 101,13 poin. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh mewabahnya Covid-19 serta isu global lainnya yang membuat penerimaan peternak dari hasil produksi lebih kecil

dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi rumah tangganya.

Tabel. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Renstra 2019 – 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Target Tahun Akhir Renstra (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
		Target	Capaian		
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	116,02	101,13	116,81	86,58

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target pada akhir tahun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Tahun 2023). Capaian NTP Peternakan tahun 2022 masih cukup jauh jika dibandingkan dengan target pada akhir tahun Renstra yaitu 86,58%, untuk itu dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak untuk mendongkrak NTP Peternakan di tahun 2023.

Secara umum, salah satu penyebab tidak optimalnya capaian NTP sektor Peternakan di tahun 2022 adalah cukup besarnya pengeluaran peternak / masyarakat di sektor peternakan untuk kebutuhan sehari – hari akibat meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok serta untuk biaya produksi usaha peternakan mereka. Walaupun secara umum pendapatan peternak / masyarakat di sektor peternakan pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan pengeluaran mereka yang ditunjukkan dengan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 112,83 poin berbanding dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang sebesar 111,55 poin. Kedepannya strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu masyarakat dalam menghadapinya adalah dengan memberikan bantuan berupa bibit ternak unggas kepada kelompok tani ternak serta penyediaan skim kredit usaha melalui dan KUR peternakan serta asuransi ternak.

## Indikator 2 : Produksi Daging

Tabel. Perkembangan Capaian Produksi Daging Tahun 2019 - 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Persentase Pencapaian (%)	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Capaian				
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	Produksi Daging (Ton)	224.675,08	280.713,07	124,94	258.090,36	218.083,49	230.797,03

Dari tabel diatas dapat dilihat data produksi daging di Sumatera Utara tahun 2022 sebesar 280.713,07 ton. Capaian ini lebih besar 24,94% dari target yang telah ditentukan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023. Adapun target peningkatan produksi daging tahun 2022 menurut Dokumen Renstra adalah sebesar 224.675,08 ton. Pencapaian produksi daging ini terutama didukung oleh produksi daging ayam ras pedaging dimana sejak tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah bersinergi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal perolehan data mengenai populasi serta produksi daripada ayam ras baik pedaging maupun petelur. Capaian produksi daging tahun 2022 juga melebihi capaian tahun 2021 yang sebesar 230.797,03 kg.

Tabel. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Renstra 2019 – 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Target Tahun Akhir Renstra (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
		Target	Capaian		
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	Produksi Daging (Ton)	224.675,08	280.713,07	228.045,21	123,10

Capaian Produksi Daging pada tahun 2022 telah melampaui target pada akhir tahun Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Komoditas andalan Provinsi Sumatera

Utara dalam pencapaian produksi daging tahun 2022 adalah unggas. Komoditas ini terbagi dalam ayam buras, ayam ras pedaging dan petelur, itik dan puyuh. Secara komulatif, produksi daging unggas Provinsi Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan dikirim ke beberapa provinsi tetangga.

### Indikator 3 : Produksi Telur

Tabel. Perkembangan Capaian Produksi Telur Tahun 2019 - 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Persentase Pencapaian (%)	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Capaian				
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	Produksi Telur (Ton)	484.390,38	649.490,86	134,08	541.234,15	470.179,22	479.436,25

Produksi telur pada tahun 2022 meningkat menjadi 649.490,86 ton atau meningkat sekitar 26,18% dari tahun 2021 yang sebesar 479.436,25. Produksi telur yang dimaksud adalah jumlah telur ayam, itik dan puyuh yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Utara. Target produksi telur yang ditentukan pada tahun 2022 adalah sebesar 484.390,39 ton atau mencapai 134,08%. Target yang ditetapkan untuk peningkatan produksi telur selain untuk mencukupi kebutuhan lokal Provinsi Sumatera Utara juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional, karena telur yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Utara sudah melebihi kebutuhan masyarakat lokal.

Tabel. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Renstra 2019 – 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Target Tahun Akhir Renstra (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
		Target	Capaian		
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	Produksi Telur (Ton)	484.390,38	649.490,86	491.656,24	132,10

Capaian target produksi telur pada tahun 2022 telah melampaui target pada akhir tahun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu sebesar 132,10%.

Salah satu pendukung keberhasilan capaian tersebut adalah makin meningkatnya permintaan masyarakat akan telur sebagai salah satu sumber protein yang murah.

#### Indikator 4 : Produksi Susu

Tabel. Perkembangan Capaian Produksi Susu Tahun 2019 - 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Persentase Pencapaian (%)	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Capaian				
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	Produksi Susu (Ton)	5.306,40	6.217,68	117,17	3.489,84	5.150,72	6.054,71

Produksi susu pada tahun 2022 sebesar 6.217,68 ton. Produksi susu ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 6.054,71 ton atau sebesar 2,69%. Target produksi susu yang ditentukan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.306,40 ton atau tercapai 117,17%. Peningkatan produksi susu tahun 2022 didukung dengan peningkatan populasi sapi perah di Sumatera Utara yaitu sebanyak 5.303 ekor pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 5.164 ekor.

Tabel. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Renstra 2019 – 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Target Tahun Akhir Renstra (2023)	Tingkat Kemajuan (%)
		Target	Capaian		
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	Produksi Susu (Ton)	5.306,40	6.217,68	5.386,00	115,44

Capaian indikator kinerja Produksi Susu pada tahun 2022 sudah melewati target pada akhir tahun dari pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Pencapaian tersebut dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi yang baik cukup baik. Kedepannya diharapkan agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mengkampanyekan pentingnya asupan gizi yang baik dan seimbang terutama bagi anak-

anak.

Secara umum pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan dapat dikatakan cukup berhasil walaupun capaian dari pada Nilai Tukar Peternak (NTP) sub Sektor Peternakan kurang dari target yang diharapkan yang salah satu penyebabnya adalah dikarenakan masih terdampaknya perekonomian masyarakat terhadap pandemi covid- 19 yang mempengaruhi daya beli serta permintaan masyarakat akan produk hasil peternakan serta naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya. Adapun faktor -faktor yang menunjang capaian kinerja sasaran tersebut yaitu :

- a. Terkendalinya kejadian kasus penyakit hewan menular strategis, teruma 5 penyakit (Anthrax, SE, AI, Rabies dan Jembrana) yang merupakan penyakit hewan menular srategis karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat kematian pada ternak ini juga tinggi, serta penyakit ini dapat berdampak kesehatan manusia, melalui kegiatan vaksinasi dan pengawasan keluar masuk ternak;
- b. Terkendalinya pemotongan betina produktif baik di RPH/TPH maupun pemotongan oleh masyarakat;
- c. Meningkatnya pemanfaatan teknologi Inseminasi Buatan melalui Program SIKOMANDAN;
- d. Pemanfaatan teknologi pakan olahan serta pengembangan hijauan pakan oleh peternak maupun kelompok ternak;
- e. Terlatihnya kelompok-kelompok ternak untuk pemanfaatan limbah pertanian untuk dijadikan pakan ternak ruminansia maupun unggas.
- f. Tersedianya dana hibah untuk kegiatan pengembangan ternak

Kedepannya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas bibit ternak melalui pengembangan isntalasi pembibitan, optimalisasi inseminasi buatan;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak;
- c. Optimalisasi pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS);
- d. Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan;

Di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terus melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan NTP Peternakan dan produksi daging, susu dan telur, antara lain melalui pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta 6 kegiatan pendukung yaitu : 1). Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi; 2). Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi; 3). Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor; 4). Penataan Prasarana Pertanian; 5). Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 6). Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi. Pada akhir TA. 2022 semua indikator pada program tersebut mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan dari 6 kegiatan pendukung terdapat satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.



## B. REALISASI ANGGARAN

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Jumlah anggaran dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2022 dipandang cukup efektif dengan memberikan hasil yang baik. Hal ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk terus saling bekerja sama dan saling mendukung dalam kemajuan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Sumatera Utara pada tahun-tahun mendatang.

Tabel. Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan TA. 2022

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TOTAL REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN</b>	<b>92.904.607.250</b>	<b>87.028.959.446,63</b>	<b>93,68</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>52.648.929.108</b>	<b>50.831.547.557,06</b>	<b>96,55</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>46.518.234.933</b>	<b>44.922.277.967,24</b>	<b>96,57</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.529.307.250</b>	<b>1.510.760.723,00</b>	<b>98,79</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	543.167.800	542.674.793,20	99,91
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	986.139.450	968.085.929,80	98,17
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>32.010.691.128</b>	<b>30.607.504.893</b>	<b>95,62</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	31.041.539.528	29.641.583.293	95,49
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	789.375.600	786.145.600	99,59
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	179.776.000	179.776.000	100
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>340.677.900</b>	<b>340.677.900</b>	<b>100</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	340.677.900	340.677.900	100
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>655.420.000</b>	<b>630.037.620</b>	<b>96,13</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	511.000.000	496.329.620	97,13

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	144.420.000	133.708.000	92,58
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.957.086.600</b>	<b>1.945.093.519</b>	<b>99,39</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	42.685.600	42.083.305	98,59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	422.896.600	413.656.041	97,81
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129.352.400	129.352.400	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	46.740.000	44.592.000	95,4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.315.412.000	1.315.409.773	100
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.660.782.305</b>	<b>2.623.135.910</b>	<b>98,59</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.472.602.925	1.452.714.800	98,65
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.188.179.380	1.170.421.110	98,51
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.543.168.650</b>	<b>6.444.031.900</b>	<b>98,48</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.800.000	47.800.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	445.000.000	431.795.650	97,03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.050.368.650	5.964.436.250	98,58
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>821.101.100</b>	<b>821.035.502</b>	<b>99,99</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	703.601.100	703.535.502	99,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.500.000	117.500.000	100
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>4.535.479.125</b>	<b>4.424.666.496,82</b>	<b>97,56</b>

<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>2.083.448.025</b>	<b>1.987.945.625</b>	<b>95,42</b>
Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	1.048.401.025	1.015.781.625	96,89
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	1.035.047.000	972.164.000	93,92
<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>1.496.277.100</b>	<b>1.482.558.070</b>	<b>99,08</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	1.496.277.100	1.482.558.070	99,08
<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</b>	<b>955.754.000</b>	<b>954.162.802</b>	<b>99,83</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	955.754.000	954.162.802	99,83
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>1.001.428.000</b>	<b>924.537.730,00</b>	<b>92,32</b>
<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.001.428.000</b>	<b>924.537.730</b>	<b>92,32</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1.001.428.000	924.537.730	92,32
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>593.787.050</b>	<b>560.065.363</b>	<b>94,32</b>
<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>593.787.050</b>	<b>560.065.363</b>	<b>94,32</b>
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	593.787.050	560.065.363	94,32
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>40.255.678.142</b>	<b>36.197.411.889,57</b>	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>17.427.010.322</b>	<b>16.379.976.672,98</b>	<b>93,99</b>

<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>5.728.784.575</b>	<b>5.382.536.653,98</b>	<b>93,96</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	675.258.550	558.841.239,43	82,76
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (di UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona)	1.461.414.530	1.362.511.212,00	93,23
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (di UPT Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang)	3.592.111.495	3.461.184.202,55	96,36
<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>11.426.126.661</b>	<b>10.762.780.730,00</b>	<b>94,19</b>
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	7.274.637.200	7.199.945.606	98,97
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	4.151.489.461	3.562.835.124,00	85,82
<b>Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor</b>	<b>272.099.086</b>	<b>234.659.289,00</b>	<b>86,24</b>
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	272.099.086	234.659.289,00	86,24
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>12.261.969.872</b>	<b>11.487.221.653,59</b>	<b>93,68</b>
<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>12.261.969.872</b>	<b>11.487.221.653,59</b>	<b>93,68</b>
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	5.988.143.680	5.505.880.270,33	91,95

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	717.048.750	711.912.905,70	99
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPT. Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona)	1.440.674.150	1.428.634.762,87	99
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPT. Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang)	4.116.103.292	3.840.793.714,69	93,31
<b>PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>10.566.697.948</b>	<b>8.330.213.563,00</b>	<b>78,83</b>
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>9.356.917.334</b>	<b>7.245.537.375,00</b>	<b>77,44</b>
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	7.539.654.570	5.705.025.785	75,67
Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.817.262.764	1.540.511.590	84,77
<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>	<b>1.209.780.614</b>	<b>1.084.676.188</b>	<b>89,66</b>
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1.209.780.614	1.084.676.188	89,66

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Tinjauan Umum**

Dengan titik tolak Dokumen Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban kepada pemberi wewenang. Penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, terdapat 2 Indikator yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran strategis Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat yang dinilai dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan capaian yang kurang memuaskan dimana Skor PPH Konsumsi tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pola konsumsi pangan masyarakat Sumatera Utara masih kurang yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Pada sasaran kedua Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan, indikator produksi daging, telur dan susu menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk indikator produksi daging, capaiannya adalah 124,94% dari target yang ditetapkan atau sebesar 280.713,07 ton. Capaian produksi telur pada tahun 2022 ini sebesar 649.490,86 ton atau 134,08% dari target yang ditetapkan. Sedangkan capaian produksi susu pada tahun 2022 adalah 6.217,68 ton atau 117,17% dari target yang ditetapkan 5.306,40 ton. Pada sasaran ini hanya indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sektor Peternakan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87,2 poin dari target sebesar 89,59 poin.

### **4.2 Tinjauan Khusus**

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik. Indikatornya adalah kedua sasaran strategis yang telah ditetapkan, menunjukkan

peningkatan dibanding tahun sebelumnya walaupun ada dua indikator yang tidak mencapai target.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2022 antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya bibit ternak ruminansia unggul di Sumatera Utara;
2. Masih terbatasnya lahan perkebunan untuk penggembalaan yang dapat diakses oleh peternak;
3. Terjadinya kenaikan harga pakan yang disebabkan oleh sebagian bahan baku diimpor dan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga jual komoditi peternakan (telur, ayam, dll)
4. Masih ditemukan penyakit hewan menular secara sporadik;
5. Pemotongan ternak betina produktif belum terkendali;
6. Rendahnya kualitas SDM dan modal usaha petani / peternak;
7. Sistem pemasaran belum efisien dan berkeadilan (harga masih ditentukan pedagang);
8. Kurangnya petugas lapangan (penyuluh, inseminator, medik veteriner);
9. Kurangnya pengawasan keamanan pangan asal hewan dan tumbuhan;
10. Masih terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan tertentu, disebabkan ketersediaan dan distribusi yang belum merata;
11. Kurangnya regulasi yang terkait dengan bidang ketahanan pangan dan peternakan.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan tindak lanjut/upaya-upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu genetik sapi melalui Inseminasi Buatan, kerjasama dengan korporasi serta pembibitan ternak di balai;
2. Pengembangan integrasi ternak dengan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pengembangan pakan ternak melalui pembangunan pabrik pakan mini, pembangunan rumah kompos serta penyebaran bibit serta pembuatan demplot hijauan pakan ternak;
4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan;
5. Pengembangan desa/kampung ternak;
6. Pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan.
7. Penganekaragaman konsumsi pangan serta pengawasan keamanan pangan segar.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan atas partisipasi semua pihak dalam penyusunan laporan ini di ucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Sumatera Utara di masa depan.